

Aspek Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah: Perkembangan Luas panen Padi, Produktivitas Lahan, Subsidi Input, Harga Beras, Jumlah Penduduk, Produksi dan Konsumsi Beras

Aspects of Food Security in Central Java Province: Development of Rice Harvested Area, Land Productivity, Input Subsidies, Rice Prices, Population, Rice Production and Consumption

Herning Prabayanti¹, Joko Sutrisno², Ernoiz Antriyandarti³

^{1,2,3}Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pspfs.v4i.480](https://doi.org/10.30595/pspfs.v4i.480)

Submitted:

August 20, 2022

Accepted:

Oct 28, 2022

Published:

Nov 17, 2022

Keywords:

Ketahanan Pangan, Sdgs,
Beras, KSA

ABSTRACT

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Beras sebagai makanan pokok utama penduduk Indonesia merupakan bagian dari tradisi yang juga berperan sebagai simbol dan perekat sosial. Ketahanan pangan dapat dikatakan sebagai situasi ketika semua orang pada setiap saat memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi agar kebutuhan preferensi pangan terpenuhi sehingga dapat hidup aktif dan sehat. Tujuan kedua dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) berupa *zero hunger* pada tahun 2030. Indonesia mendukung tercapainya tujuan SDGs tersebut dengan membuat prioritas atas tujuan dan target pada SDGs. Oleh karena itu, Indonesia juga harus mewujudkan ketahanan pangan terutama pada subsistem produksi beras sebagai makanan pokok utama. Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi produsen beras tertinggi harus menjaga kontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional demi terwujudnya tujuan SDGs. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan luas panen padi, produktivitas lahan, subsidi input, harga beras, jumlah penduduk, produksi dan konsumsi beras di Provinsi Jawa Tengah. Metode dasar dalam penelitian ini adalah deskriptif. Teknik Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Adapun data yang digunakan merupakan data sekunder berupa data panel dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan luas panen padi yang dihitung dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA), produktivitas lahan, subsidi input yang berupa pupuk dan benih, harga beras berfluktuasi. Jumlah penduduk mengalami peningkatan dari tahun 2019 s.d. 2021. Konsumsi lebih kecil dari produksi beras sehingga Jawa Tengah masih mengalami surplus. Namun, Jawa Tengah tetap harus menjaga produksi beras agar dapat meningkatkan kontribusi untuk ketahanan pangan Indonesia.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Herning Prabayanti

Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret

1. PENDAHULUAN

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ketidak-stabilan ekonomi dapat terjadi jika ketersediaan pangan lebih kecil dibanding kebutuhannya. Beras mempunyai nilai strategis di Indonesia. Oleh karena itu, pangan sering kali identik dengan beras (Bulog, 2014). Bukan hanya sebagai pangan pokok, beras juga merupakan bagian dari tradisi yang dibagikan pada acara-acara tertentu seperti tahlilan atau selamatan (Yuwono, 2019). Stajcic (2013) berpendapat jika tradisi menunjukkan simbol dan perekat sosial sehingga tidak mudah dirubah.

FAO (2021) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi ketika semua orang pada setiap saat memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan preferensi pangan untuk hidup aktif dan sehat. Pasal 64 dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, *zero hunger* pada tahun 2030 ditetapkan sebagai tujuan kedua dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) (UNDP, 2022). Sebagai anggota PBB, Indonesia juga harus membuat prioritas atas tujuan dan target pada SDGs tersebut.

Persyaratan utama untuk mewujudkan ketahanan pangan ialah subsistem ketersediaan yang mana produksi pangan berasal dari subsistem tersebut (Suryana, 2014; Hermanto, 2015). Oleh karena itu, Indonesia harus mewujudkan ketersediaan pangan pokok berupa beras sebagai makanan pokok utama. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan perubahan ketentuan pasal 14 dari Undang-undang No. 18 Tahun 2012 di mana sumber penyediaan pangan diprioritaskan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan/atau Impor. Namun, pemerintah berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin meningkat dan secara geografis tersebar. Penyediaan kebutuhan pangan tersebut tidak mudah karena proyeksi jumlah penduduk yang mencapai 322 juta jiwa pada tahun 2050.

Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional, dan peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan merupakan strategi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan. Peningkatan produksi maupun produktivitas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Salah satu hal dalam ketahanan pangan tersebut dapat dicapai melalui ketersediaan beras yang harus diperhatikan agar ketahanan pangan dari aspek ketersediaan dapat tercapai (Aprillya *et al.*, 2019; Kementan RI, 2020d).

Salah satu provinsi penyangga beras di Indonesia adalah Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2019 produksi padi Jawa Tengah merupakan yang tertinggi di Indonesia (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2020). Produksi padi diperoleh dari hasil perkalian luas panen dengan produktivitas. Angka konversi GKP ke GKG dan GKG menjadi beras merupakan angka hasil survei pada level provinsi dan digunakan dalam perhitungan GKG dan beras. Angka konversi yang digunakan dalam perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) 2018-2020 (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022a). Tingginya pencapaian produksi beras tersebut diharapkan dapat terus meningkat. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kontribusi Jawa Tengah sebagai penyangga pangan nasional. Namun, pada kenyataannya aspek-aspek dalam ketahanan pangan yang lainnya seperti perkembangan luas panen padi, subsidi input, harga beras, jumlah penduduk, produksi dan konsumsi beras berfluktuasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan luas panen padi, produktivitas lahan, subsidi input, harga beras, jumlah penduduk, produksi dan konsumsi beras di Provinsi Jawa Tengah. Uraian dalam artikel ini dapat menggambarkan kondisi perberasan di Jawa Tengah sehingga dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan terkait ketahanan pangan terutama beras yang merupakan makanan pokok utama bagi penduduk Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode dasar dalam penelitian ini adalah deskriptif, di mana penelitian bertujuan menggambarkan variabel penelitian (Martono, 2019). Penelitian dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah pada bulan Juli 2022. Jawa Tengah sengaja dipilih karena merupakan salah satu provinsi penyangga beras di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sesuai dengan yang diungkapkan Martono (2019) bahwa data sekunder tersedia di lembaga pemerintah atau lainnya. Adapun data dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dari BPS, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Data yang diperoleh merupakan data panel tahun 2019 s.d. 2021 untuk 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Juanda dan Junaidi (2012) menyebutkan bahwa data panel atau *pooled data* merupakan data yang terdiri dari data *time series* dan *cross section*.

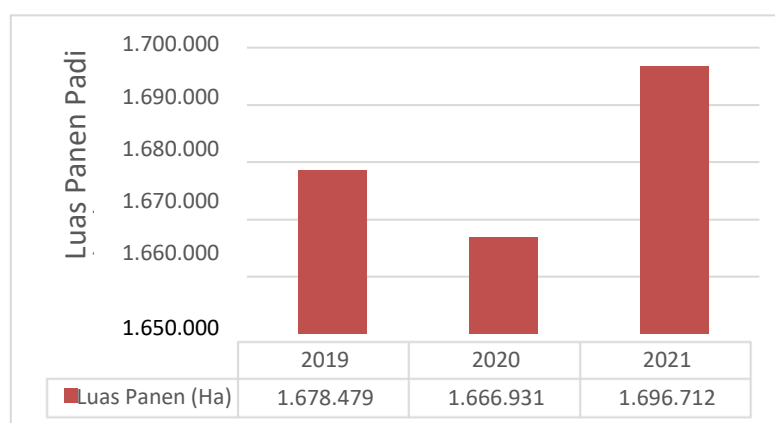
Teknik Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif yang mana dalam teknik tersebut data dideskripsikan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Data dapat disajikan dengan perhitungan mean, median, dan modus, tabel, piktogram, grafik maupun diagram (Sugiyono, 2015).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Luas Panen Padi

Pulau Jawa merupakan pulau penghasil padi terbesar di Indonesia. Namun, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 menyatakan bahwa 56,10% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Luas wilayah Pulau Jawa sendiri sebesar 7% dari keseluruhan wilayah Indonesia (BPS, 2021). Hal tersebut berkorelasi dengan permintaan fasilitas permukiman, sosial dan ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya lahan pertanian produktif seperti sawah. Menurut Yuwono (2019), tanah merupakan media tanam utama untuk mencukupi kebutuhan pangan di Indonesia.

Metode kerangka sampel area (KSA) digunakan BPS untuk menghitung luas panen padi. Metode KSA tersebut digunakan untuk menghitung luas panen padi agar lebih objektif. Metode ini merupakan survei berbasis area yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap sampel. Tujuan KSA adalah untuk mengestimasi luasan dengan perluasan data di luar data yang tersedia tetapi tetap mengikuti pola kecenderungan data yang tersedia dari sampel ke populasi dalam periode yang relatif pendek (*rapid estimate*) (BPS, 2018).



Gambar 1. Perkembangan Luas Panen Padi tahun 2019 s.d. 2021 di Povinsi Jawa Tengah (Ha) Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2021, 2022)

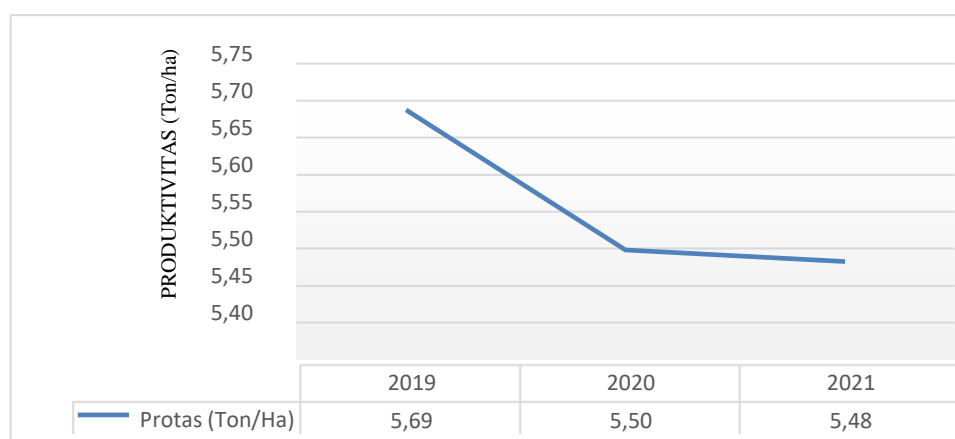
Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa luas panen padi di Jawa Tengah berfluktuasi. Luas panen padi tahun 2020 mengalami penurunan karena cuaca ekstrim di mana banjir terjadi di awal tahun kemudian disusul kemarau panjang (Kontan, 2020). Hal tersebut menyebabkan luas panen padi turun 0,69% dari tahun 2019. Namun, tahun 2021 luas panen padi di Jawa Tengah meningkat 29.781 hektar. Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020 s.d. 2024 menyatakan bahwa target produksi padi ditentukan oleh luas panen. Akan tetapi, mayoritas petani menguasai lahan pertanian yang sempit sehingga usahatani menjadi tidak efisien. Hal tersebut terjadi karena adanya jual beli tanah, fragmentasi, dan konversi lahan pertanian (Kementan RI, 2020d).

BPS Provinsi Jawa Tengah (2021, 2022) mencatat bahwa penyumbang luas panen tertinggi di Jawa Tengah selama tahun 2019 s.d. 2021 adalah Kabupaten Grobogan. Luas panen padi di Kabupaten Grobogan juga fluktuatif di mana luas panen padi tahun 2019 sebesar 136.210 ha, tahun 2020 turun menjadi 131.930 ha, dan tahun 2021 kembali naik menjadi 132.664 ha. Kota Surakarta menjadi penyumbang luas panen padi terkecil dan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2019 luas panen padi di Kota Surakarta mencapai 45 ha, tahun 2020 turun menjadi 39 ha, dan menjadi 33 ha pada tahun 2021.

Perkembangan Produktivitas Lahan

Produktivitas lahan dalam penelitian ini merupakan nilai rata-rata hasil produksi per satuan luas per komoditas pada periode satu tahun laporan. Gambar 2 menunjukkan tingginya produktivitas padi tahun 2019 di Jawa Tengah sehingga mampu menjadi provinsi penghasil padi terbanyak di Indonesia. Produktivitas pada tahun 2019 mencapai 5,69 ton/ha. Produktivitas tahun 2020 turun menjadi 5,50 ton/ha. Tahun 2021 kembali turun menjadi 5,48 ton/ha meskipun luas panen meningkat.

Produktivitas lahan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 6,92 ton/ha di Kabupaten Sukoharjo. Produktivitas terendah sebesar 4,40 ton/ha di Kabupaten Rembang. Produktivitas lahan di tahun 2020 menurun di mana produktivitas tertinggi sebesar 6,87 ton/ha masih bertahan di Kabupaten Sukoharjo sedangkan produktivitas terendah sebesar 3,56 ton/ha di Kota Tegal. Produktivitas lahan tahun 2021 juga kembali menurun. Produktivitas tertinggi sebesar 6,63 ton/ha di Kabupaten Sragen dan terendah di Kabupaten Pekalongan sebesar 4,44 ton/ha (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021a,2022a).

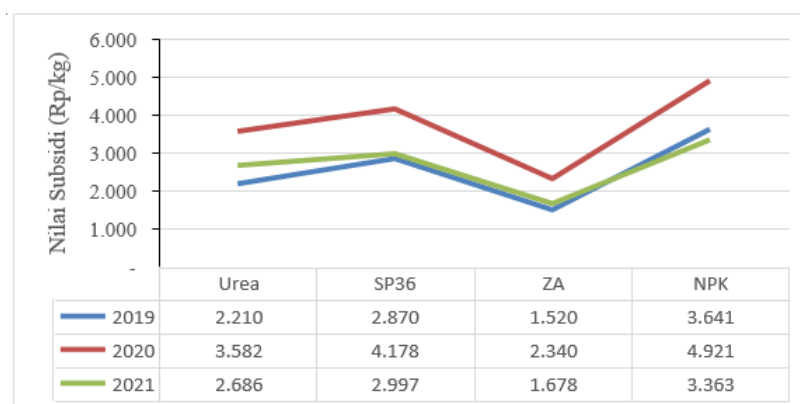


Gambar 2. Perkembangan Produktivitas Lahan Padi Tahun 2019 s.d 2021 di Provinsi Jawa Tengah (Ton/ha)
Sumber: BPS Provinsi Jawa tengah (2021, 2022)

Perkembangan Subsidi Input

Subsidi input dalam penelitian ini berupa subsidi pupuk dan subsidi benih. Besarnya subsidi pupuk merupakan selisih antara harga pokok penjualan (HPP) dengan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi (Kemenkeu RI, 2016). Adapun subsidi benih merupakan volume benih padi diberikan dalam bentuk natura kepada petani

Tahun 2019 s.d. 2021, pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang bergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam sistem e-RDKK, menunjukkan identitas (kartu tanda penduduk) dan mengisi form penebusan pupuk bersubsidi. Adapun alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), usulan kebutuhan pupuk dari pemerintah daerah provinsi, penyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya, dan alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia



Gambar 3. Grafik Nilai Subsidi Pupuk Anorganik Bersubsidi dengan Produsen PT Petrokimia Gresik Tahun 2019 s.d 2021 (Rp/kg)

Sumber: Kementan RI (2018, 2019, 2020a, 2020b, 2020c, 2021) diolah

Gambar 3 menunjukkan fluktuasi subsidi masing-masing jenis pupuk anorganik selama tahun 2019 s.d. 2021. Harga tersebut merupakan nilai subsidi yang dihitung dengan pengurangan HPP pupuk anorganik (Rp/kg) sesuai Kepmentan untuk produsen PT Petrokimia Gresik dengan HET pupuk anorganik pada Permentan. Mengutip dari Wahyudi (2022) dalam Bisnis.com yang menyatakan bahwa harga pupuk terus meningkat karena kenaikan harga bahan baku pupuk anorganik yang berupa gas alam. Indonesia memperoleh bahan baku

tersebut diperoleh dari impor. Grafik pada Gambar 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 nilai subsidi pupuk meningkat dari tahun 2019. Namun, tahun 2021 kembali menurun.

Tabel 1. Nilai Subsidi Pupuk Anorganik tahun 2019 s.d. 2021 untuk Provinsi Jawa Tengah

Jenis Pupuk	Nilai Subsidi		
	2019	2020	2021
Urea	1.508.480.230.400	2.572.557.514.902	1.479.837.767.611
SP 36	377.655.637.100	419.437.053.206	126.580.326.966
ZA	274.829.968.800	367.856.711.820	189.295.697.663
NPK	1.262.461.333.980	2.123.966.273.856	1.450.316.056.140
Total	3.423.427.170.280	5.483.817.553.784	3.246.029.848.380

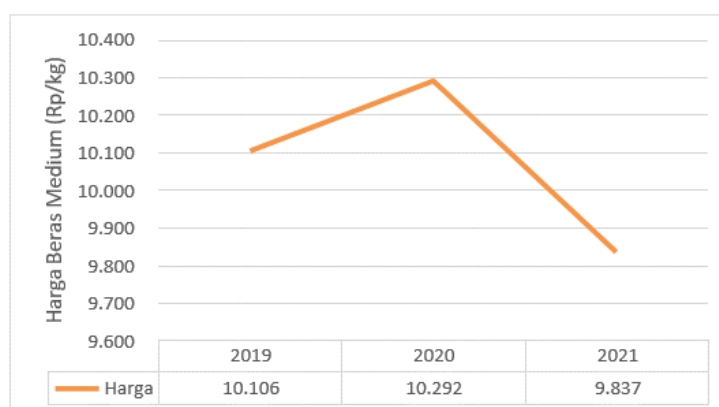
Sumber : Kementan RI berbagai terbitan, diolah

Tabel 1 menunjukkan pada nilai subsidi pupuk anorganik di Jawa Tengah. Subsidi pupuk anorganik tahun 2019 senilai 3,42 triliun, tahun 2020 senilai 5,48 triliun, dan 3,25 triliun pada tahun 2021. Terlihat jika pemerintah mengeluarkan subsidi terbesar di tahun 2020 selama kurun waktu tiga tahun tersebut. Nilai subsidi pupuk anorganik tersebut dihitung dengan asumsi harga pokok penjualan (HPP) untuk produsen PT Petrokimia Gresik.

Pemerintah juga memberikan subsidi input benih. Mekanisme pemberian subsidi benih berbeda dengan subsidi pupuk. Pemerintah mengalokasikan benih dalam bentuk natura dengan dana yang bersumber dari DIPA APBN. Penetapan petani penerima dilakukan melalui pengajuan calon petani dan calon lokasi (CPCL) secara berjenjang dari kelompok tani hingga Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Benih yang disalurkan merupakan benih bersertifikat dengan alokasi 25 kg/ha untuk benih padi inbrida. Alokasi subsidi benih meningkat dari tahun 2019 s.d. 2021, di mana pada tahun 2019 mendapat alokasi 500.000 kg, 2020 dengan alokasi 3.300.000 kg, dan 2021 kembali meningkat menjadi 4.083.375 kg (Distanbun Prov. Jateng, 2022). Hasil penelitian Riefqi *et al.* (2017) menyebutkan bahwa hasil produksi petani lebih tinggi dengan penggunaan benih subsidi bersertifikat.

Terdapat 23 kabupaten dan 1 kota yang mengajukan CPCL subsidi benih tahun 2019. Tahun 2020 naik menjadi 30 kabupaten dan 1 kota dengan alokasi tertinggi di Kabupaten Cilacap sebanyak 750.000 kg dan terendah 12.500 di Kota Semarang. Tahun 2021 terdapat 27 kabupaten dan 1 kota yang mengajukan CPCL dengan alokasi tertinggi di Kabupaten Sragen sebanyak 479.725 kg dan terendah di Kabupaten Wonosobo sebanyak 750 kg.

Perkembangan Harga Beras



Gambar 4. Rata-rata Harga Beras Medium Tahun 2019 s.d 2020 di Provinsi Jawa Tengah (Rp/kg)

Sumber : Dishanpan Provinsi Jawa Tengah (2022)

Salah satu masalah dalam sektor pertanian adalah tidak stabilnya harga (Septiadi *et al.*, 2016). Ilyas *et al.* (2020) menyebutkan salah satu insentif pemerintah kepada petani adalah dengan penentuan harga pembelian pemerintah (HPP). HPP gabah atau beras diatur dalam Permendag Nomor 24 Tahun 2020 di mana HPP beras ditetapkan sebesar Rp 8.300,00/kg (Kemendag RI, 2020). Pemerintah juga mengeluarkan regulasi berupa harga eceran tertinggi (HET) agar daya beli masyarakat tetap terjaga. HET tersebut dikeluarkan karena disparitas harga di tingkat produsen dan konsumen. HET beras tertuang dalam Permendag Nomor 57 Tahun 2017. HET beras di wilayah Jawa ditetapkan Rp 9.450,00/kg untuk beras jenis medium. Adapun yang dimaksud dengan beras

medium adalah beras yang mempunyai derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, dan butir patah maksimal 25% (Kemendag RI, 2017).

Rata-rata harga eceran beras medium pada tahun 2019 s.d. 2021 berfluktuasi. Gambar 4 menunjukkan jika harga beras medium sudah lebih tinggi dari HPP yang ditetapkan pemerintah. Namun, dalam kurun waktu tiga tahun tersebut harga beras di pasaran sudah melebihi HET yang ditentukan pemerintah. Pemerintah Indonesia sendiri belum melakukan perubahan HET sejak tahun 2017.



Gambar 5. Harga Beras Medium Tertinggi dan Terendah Tahun 2019 s.d. 2021 di Provinsi Jawa Tengah (Rp)
Sumber : Dishanpan Provinsi Jawa Tengah (2022)

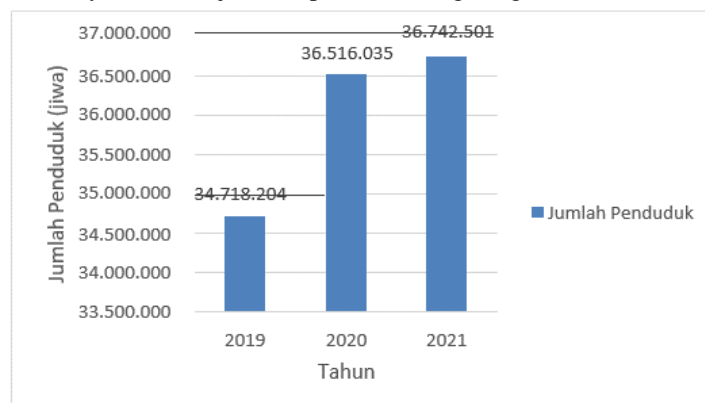
Gambar 5 menunjukkan jika harga beras medium di Jawa Tengah sudah di atas HPP yang ditetapkan pemerintah. Namun, harga tertinggi beras medium sudah jauh di atas HET yang ditetapkan pemerintah. Harga beras medium tertinggi tahun 2019 dan 2020 ada di Kabupaten Wonosobo, sementara tahun 2021 di Kabupaten Boyolali. Harga beras medium terendah pada tahun 2019 di Kabupaten Kebumen. Tahun 2020 dan 2021 harga beras medium terendah di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan data pada Gambar 5 menunjukkan jika di Jawa Tengah masihterjadi disparitas harga beras antar wilayah.

Perkembangan Jumlah Penduduk

Pertumbuhan populasi tidak akan seimbang dengan persediaan pangan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Malthus, di mana pangan bertambah dengan deret hitung sedangkan pertumbuhan penduduk sesuai dengan deret ukur (Todaro dan Smith, 2015). Kuantitas kebutuhan pangan setiap tahun akan meningkat karena pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi tersebut (Suryana, 2014).

Gambar 6 menunjukkan jika jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Tahun 2019 ke 2020 terdapat peningkatan jumlah penduduk 1.797.831 jiwa dan 2020 ke 2021 meningkat 226.446 jiwa. Hal tersebut tentunya seharusnya diiringi dengan ketersediaan pangan bagi penduduk.

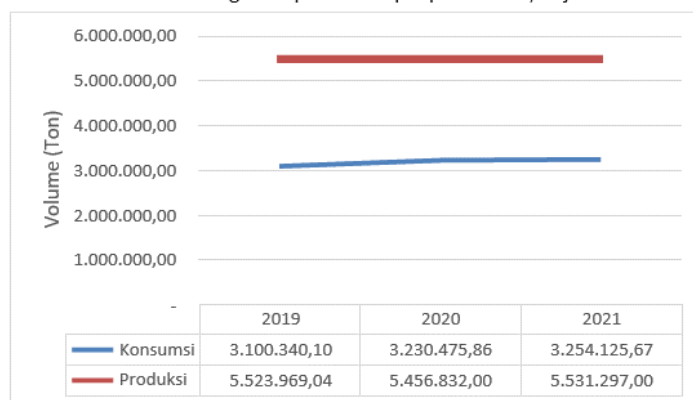
Kota Semarang memiliki jumlah penduduk terbanyak di tahun 2019 yaitu 1.824.110 jiwa dan terendah di Kota Magelang sebesar 122.111 jiwa. Tahun 2020 penduduk terbanyak sebesar 1.978.759 jiwa berada di Kabupaten Brebes sedangkan terendah masih berada di Kota Magelang dengan 121.526 jiwa. Kabupaten Brebes masih memiliki jumlah penduduk terbanyak di tahun 2021 yaitu sebanyak 1.992.685 jiwa atau meningkat 13.932 jiwa sedangkan terendah sebanyak 121.610 jiwa tetap di Kota Magelang.



Gambar 6. Jumlah Penduduk Tahun 2019 s.d. 2021 di Provinsi Jawa Tengah (jiwa)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2021b, 2022b)

Perkembangan Produksi dan Konsumsi Beras

Gambar 5 menunjukkan bahwa data produksi berfluktuasi selama kurun waktu tiga tahun di mana pada tahun 2019, Provinsi Jawa Tengah dapat memproduksi beras sebanyak 5,52 juta ton. Capaian produksi tahun 2019 tersebut mampu menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan produksi tertinggi di Indonesia. Produksi tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 5,46 juta ton. Salah satu penyebab penurunan tersebut adalah turunnya luas panen padi di tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah dapat mencapai produksi 5,53 juta ton.



Gambar 7. Grafik Konsumsi dan Produksi Beras tahun 2019 s.d. 2021 di Provinsi Jawa Tengah (Ton)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2021b, 2022b)

Konsumsi beras di Jawa Tengah meningkat dari tahun 2019 s.d. 2021. Konsumsi dalam penelitian ini dihitung dengan mengalikan jumlah penduduk dengan konsumsi beras per kapita pertahun. Konsumsi beras per kapita per tahun di Provinsi Jawa Tengah cenderung menurun di manapada tahun 2019 sebesar 88,79 per kapita per tahun, tahun 2020 sebesar 87,37 per kapita per tahun, dan 2021 sebesar 86,85 per kapita per tahun. Penurunan konsumsi beras tersebut tidak serta merta menurunkan total konsumsi beras di Jawa Tengah karena jumlah penduduk juga terus meningkat. Konsumsi tahun 2019 sebanyak 3,1 juta ton. Tahun 2020 konsumsi meningkat menjadi 3,2 juta ton dan kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 3,3 juta ton.

Produksi beras masih lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi beras di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dapat diartikan jika Provinsi Jawa Tengah surplus beras. Namun, Jawa Tengah tetap harus menjaga produksi beras. Hal tersebut merupakan upaya dalam menjaga kontribusi Jawa Tengah untuk ketahanan pangan Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa luas panen padi di Jawa Tengah berfluktuasi. Hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas lahan. Subsidi input yang diperoleh petani berupa subsidis pupuk dan benih. Pengeluaran subsidi pupuk selama kurun waktu 2019 s.d. 2021 paling besar di tahun 2020. Hal tersebut disebabkan tingginya bahan baku pembuatan pupuk anorganik di pasaran internasional. Subsidi benih meningkat dari tahun ke tahun yang mana subsidi diberikan berupa natura dengan kuantitas 25 kg/ha untuk benih padi inbrida bersertifikat. Harga beras medium juga berfluktuasi. Harga beras medium tersebut sudah di atas HPP yang ditetapkan pemerintah dan juga lebih tinggi dari HET. Jumlah penduduk Jawa Tengah terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2019 s.d. 2021. Hal tersebut tentunya berkorelasi dengan volume konsumsi beras di Provinsi Jawa Tengah. Dilihat dari jumlah produksi yang lebih tinggi dari konsumsi menunjukkan Jawa Tengah masih mengalami surplus beras.

Saran

Upaya pemerintah dalam menjaga luas panen padi harus ditingkatkan agar tidak semakin menurunkan produktivitas karena jumlah penduduk Jawa tengah juga terus meningkat. Pemerintah juga masih perlu memberikan subsidi input bagi petani agar produksi tidak mengalami penurunan. Pemerintah juga perlu mengkaji ulang terhadap HPP dan HET beras produsen maupun konsumen terlindungi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga perlu memperhatikan agar produksi beras meningkat agar kontribusi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi penyangga beras tidak menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillya, M.R., Suryani, E. dan Dzulkarnain, A. 2019. The analysis of quality of paddy harvest yield to support food security: A system thinking approach (case study: East Java). *Procedia Computer Science*: Elsevier B.V., hal. 919–926. doi: 10.1016/j.procs.2019.11.200.
- BPS. 2018. *Upaya Perbaikan Data Padi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) 2018*. Jakarta: BPS. Tersedia pada: [https://www.bps.go.id/publication/2018/12/21/5aaf63e44aa5e46e815a1e8f/upaya-perbaikan-data-padi-dengan-metode-kerangka-sampel-area-ksa-2018.html#:~:text=Survei Kerangka Sampel Area \(KSA,relatif pendek\(rapid estimate\).](https://www.bps.go.id/publication/2018/12/21/5aaf63e44aa5e46e815a1e8f/upaya-perbaikan-data-padi-dengan-metode-kerangka-sampel-area-ksa-2018.html#:~:text=Survei Kerangka Sampel Area (KSA,relatif pendek(rapid estimate).)
- BPS. 2021. *Berita Resmi Statistik Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: bps.go.id. Tersedia pada: <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/336/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-papua-tahun-2017.html>.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. 2021a. *Luas Panen dan Produksi Padi di Jawa Tengah 2020 (Angka Tetap)*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah, hal. 1–19. Tersedia pada: <https://boyolalikab.bps.go.id/pressrelease/2021/03/05/262/luas-panen-dan-produksi-padi-di-jawa-tengah-2020--angka-tetap-.html>.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. 2021b. *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2021*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah. Tersedia pada: <https://jateng.bps.go.id/publication/2021/02/26/c5709cd0419788a55827d58f/provinsi-jawa-tengah-dalam-angka-2021.html>.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. 2022a. *Luas Panen dan Produksi Padi di Jawa Tengah 2021 (Angka Tetap)*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah, hal. 1–19. Tersedia pada: <https://boyolalikab.bps.go.id/pressrelease/2022/03/01/349/luas-panen-dan-produksi-padi-di-jawa-tengah-2021--angka-tetap-.html>.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. 2022b. *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2022*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Bulog. 2014. *Pengertian Ketahanan Pangan*. Tersedia pada: <http://www.bulog.co.id/beraspangan/ketahanan-pangan/> (Diakses: 23 Juli 2021).
- Dishanpan Prov. Jateng. 2022. *Harga Beras Medium per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Ungaran. Distanbun Prov. Jateng. 2022. *Data Bantuan Benih Padi APBN Tahun 2018 s.d. 2021 Provinsi Jawa Tengah*. Ungaran: Distanbun Prov. Jateng.
- FAO. 2021. *2021 The State of Food Security and Nutrition in the World Transforming Food Systems for Food Security, Improved Nutrition and Affordable Healthy Diets For All*, FAO. Rome: FAO. doi:10.4060/cb5409en.
- Ilyas, A., Noer, M. dan Wahyuni, I. 2020. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketersediaan Beras di Indonesia. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 6(2), hal. 740–753. doi:10.25157/ma.v6i2.3456.
- Juanda, B. dan Junaidi. 2012. *Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi*. Bogor: PT PenerbitIPB Press.
- Kemendag RI. 2017. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras*. Jakarta.
- Kemendag RI. 2020. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah Atau Beras*. Jakarta. Tersedia pada: <http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/detail/1974/2>.
- Kemenkeu RI. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk Indonesia*. Jakarta.
- Kementan RI. 2018. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019*. Jakarta: Kementan RI.
- Kementan RI. 2019. *Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 281/KPTS/SR.320/M/4/2019 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019*. Jakarta: Kementan RI.

- Kementan RI. 2020a. *Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 668/KPTS/SR.340/M/10/2020 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020*. Jakarta: Kementan RI.
- Kementan RI. 2020b. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020*. Jakarta: Kementan RI.
- Kementan RI. 2020c. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021*. Jakarta: Kementan RI.
- Kementan RI. 2020d. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementan RI.
- Kementan RI. 2021. *Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/SR.340/M/2/2021 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021*. Jakarta: Kementan RI.
- Kontan. 2020. *Luas panen menyusut, BPS catat produksi beras turun menjadi 31,31 juta ton pada 2019*. Tersedia pada: <https://industri.kontan.co.id/news/luas-panen-menyusut-bps-catat-produksi-beras-turun-menjadi-3131-juta-ton-pada-2019> (Diakses: 17 Juni 2022)
- Martono, N. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi 2*. Diedit oleh S.P.T. Utami. Depok: Rajawali Pers.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2020. *Produksi Padi di Jateng Tertinggi se-Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Tersedia pada: <https://jatengprov.go.id/publik/produksi-padi-di-jateng-tertinggi-se-indonesia/#:~:text=JAKARTA-Provinsi Jawa Tengah memperoleh,17%2F8%2F2020>. (Diakses: 23 Juli 2021).
- Riefqi, A.R., Surahman, M. dan Hastuti. 2017. Pengaruh Benih Padi (*Oryza sativa L.*) Bersubsidi terhadap Produksi dan Pendapatan Petani Padi Sawah. *Buletin Agrohorti*, 5(1), hal. 1–8. doi:10.29244/agrob.v5i1.15788.
- Septiadi, D., Harianto, H. dan Suharno, S. 2016. Dampak Kebijakan Harga Beras Dan Luas Areal Irigasi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 4(2), hal. 91. doi:10.29244/jai.2016.4.2.91-106.
- Stajcic, N. 2013. Understanding Culture: Food as a Means of Communication. *HEMISPHERES*, (28), hal. 5–14.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Diedit oleh Setiyawami. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, A. 2014. Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan Dan Penanganannya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32(2), hal. 123–135.
- Todaro, M.P. dan Smith, S.C. 2015. *Economic Development Twelfth Edition*. New Jersey: Pearson.
- UNDP. 2022. *Goal 2: Zero Hunger*. Tersedia pada: <https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/sustainable-development-goals/goal-2-zero-hunger.html>.
- Wahyudi, N.A. 2022. *Harga Pupuk Konsisten Melejit, Apa Sebabnya?*. Tersedia pada: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220207/12/1497301/harga-pupuk-konsisten-melejit-apa-sebabnya> (Diakses: 20 Juli 2022).
- Yuwono, T. 2019. *Pembangunan Pertanian Membangun Ideologi Pangan Nasional*. Yogyakarta: LilyPublisher.